



DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat hasil evaluasi Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 tahun 2026, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta rencana kerja dan pendanaannya.

Akhirnya, semoga Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman bagi para Bagian Setko Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Jakarta, 14 Agustus 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Syafrin Liputo

NIP. 197103261994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GRAFIK..... v

EXECUTIVE SUMMARY vi

PENDAHULUAN..... 8

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Landasan Hukum 10

1.3 Maksud dan Tujuan 12

1.4 Sistematika Penulisan 12

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026 15

2.2 Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Subkegiatan..... 27

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan..... 27

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta..... 31

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 34

PENUTUP 36

LAMPIRAN - LAMPIRAN 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan IV Tahun
2025 18

Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan 2 Tahun
2026 24

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta 30

Tabel 2. 4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan..... 32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Capaian Kinerja Program dan Presentase Serapan Anggaran Triwulan 4 Tahun 2025 16

Grafik 2.2 Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan..... 20

Grafik 2.3 Capaian Kinerja Program dan Presentase Serapan Anggaran Triwulan 2 Tahun 2026 21

Grafik 2.4 Capaian Kinerja Program dan Presentase Serapan Anggaran Triwulan 2 Tahun 2026 26

EXECUTIVE SUMMARY

Proses penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 memuat hasil evaluasi Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 tahun 2026, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026, serta rencana kerja dan pendanaannya.

Penyusunan RKPD mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD juga harus berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Pada RKPD tahun 2026 terdapat penyesuaian nomenklatur bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat 6 (enam) program, yaitu :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Pengelolaan Kota Administrasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2025, yang telah dilakukan penyesuaian nomenklatur bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, terdapat 5 Program, 14 kegiatan dan 73 Sub Kegiatan pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. **Total Pagu Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 1.319.094.546.807,-.**

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Kota Administrasi

Jakarta Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, struktur Prioritas RKP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 merujuk pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Di mana tujuannya adalah ***“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Ekonom Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”***.

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi triwulan, serta dalam penyusunannya tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”.

Proses penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 berpedoman kepada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunannya dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026, hasil evaluasi Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 tahun 2026, target kinerja tahun 2026 dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023- 2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah; dan
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2026 mengatur tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 44 Tahun 2025 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026
24. Surat Edaran Gubernur Nomor e-0002/SE/2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026, disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2026 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD Perubahan dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta proses penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026; analisis kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan; serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026, Analisis Kinerja Pelayanan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026.

Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan, isu-isu strategis, program dan kegiatan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.

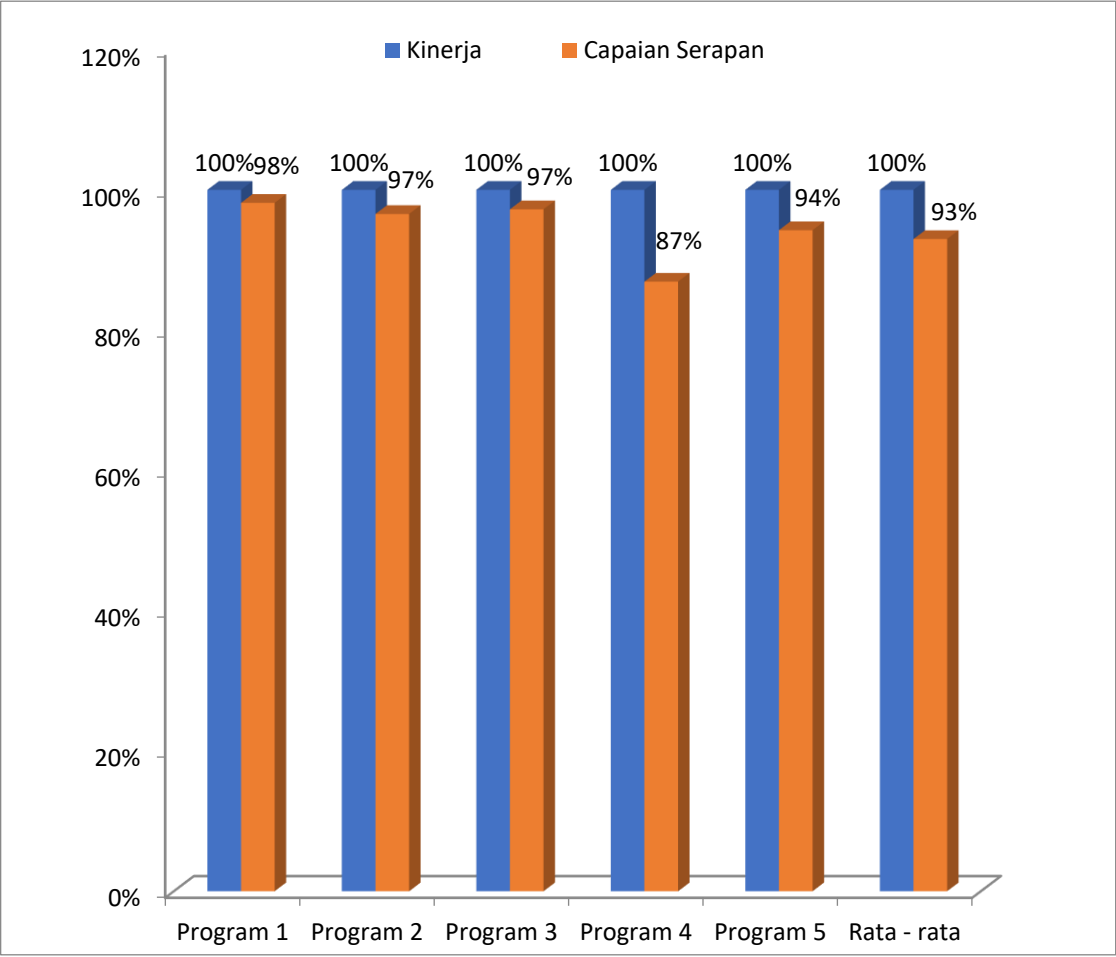
Pada RKPD tahun 2024 dan 2025 terdapat penyesuaian nomenklatur bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Pada Renja Perubahan Tahun 2026 terdapat 6 (Enam) Program yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu :

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Pengelolaan Kota Administrasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dan Triwulan 2 Tahun 2026. Rekapitulasi data target dan realisasi anggaran seluruh Program Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Renja Tahun Anggaran 2025 Triwulan 4 dapat dilihat pada Grafik 2.1. berikut :

**Grafik 2. 1 Capaian Kinerja Program dan Presentase Serapan Anggaran
Triwulan 4 Tahun 2025**



Sumber : Data tarikan yang diolah dari sistem e-Monev 2025 Triwulan 4

- A : Program Pengelolaan Kecamatan

B : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

C : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- D : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

E : Program Pengelolaan Kota Administrasi

Analisis :

Berdasarkan Grafik 1 di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 Program Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan capaian kinerja program sebesar 100%. Selain itu, diketahui realisasi serapan anggaran Triwulan 4 sebesar Rp 1.286.103.606.504,- dan realisasi sebesar Rp 1.195.102.581.450,- atau 93%.

Secara rinci Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran

Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Serapan Anggaran sebesar Rp 573.845.077.050,- dan realisasi sebesar Rp 563.229.691.064,- atau 98%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Serapan Anggaran sebesar Rp 125.083.504.100,- dan realisasi sebesar Rp 120.783.245.049,- atau 97%.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 97% dan Serapan Anggaran sebesar Rp 3.588.168.054,- dan realisasi sebesar Rp 3.488.959.851,- atau 97%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Serapan Anggaran sebesar Rp 579.634.127.308,- dan realisasi sebesar Rp 503.874.836.776,- atau 87%.
5. Program Pengelolaan Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Serapan Anggaran sebesar Rp 3.952.729.992,- dan realisasi sebesar Rp 3.725.848.710,- atau 94%.

Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan 4 Tahun 2025 yang dirinci per indikator programnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan 4 Tahun 2025

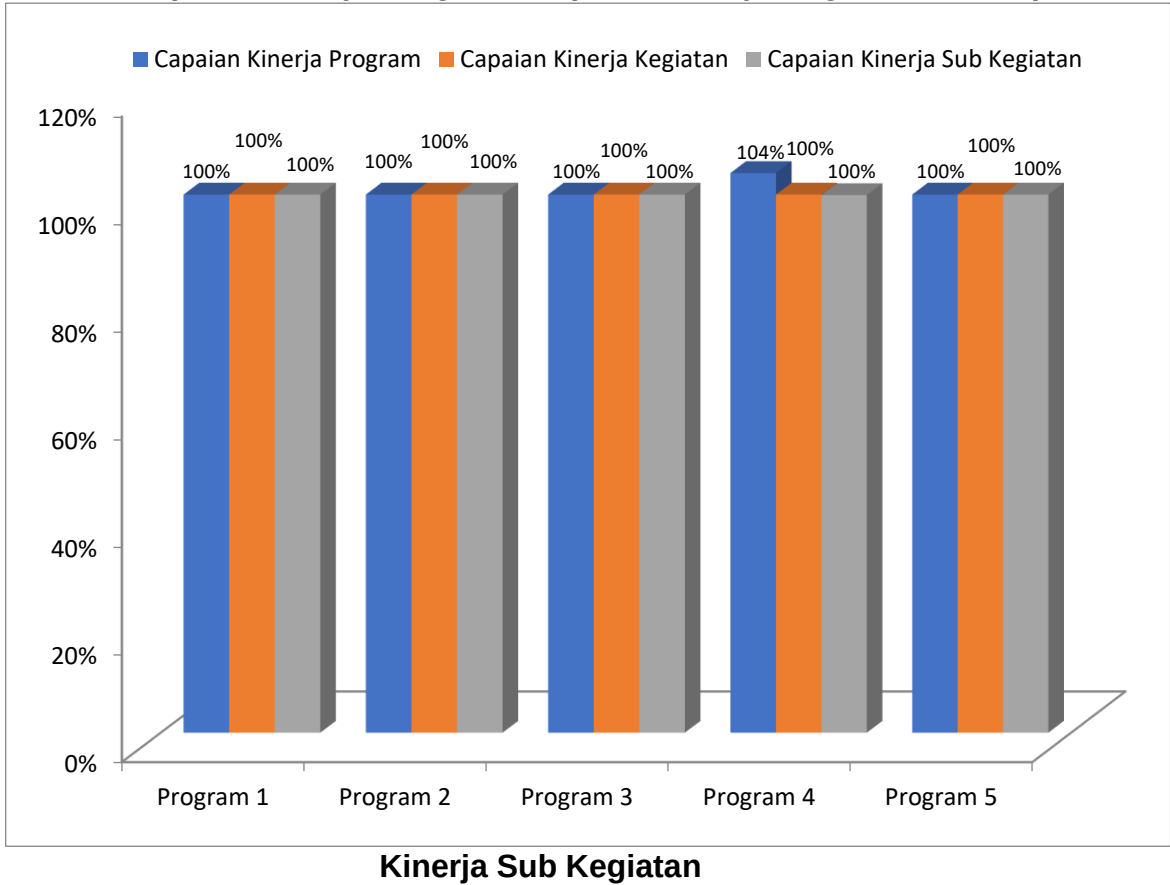
Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Rata-Rata Capaian Kinerja Program	Kriteria Realisasi Kinerja	Target Keuangan TW 4	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4	100%	Sangat Tinggi	573.845.077.050	563.229.691.064	98%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100%					
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4	4	100%	Sangat Tinggi	125.083.504.100	120.783.245.049	97%	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100%	Sangat Tinggi	3.588.168.054	3.488.959.851	97%	
7.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%	Sangat Tinggi	579.634.127.308	503.874.836.776	87%	

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Rata-Rata Capaian Kinerja Program	Kriteria Realisasi Kinerja	Target Keuangan TW 4	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	85	85	100%					
7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	92,56%	106,43%	100%	Sangat Tinggi	3.952.729.992	3.725.848.710	94%	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90,99%	102,07%	100%					
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	89,87%	103,62%	100%					
J U M L A H					100%	Sangat Tinggi	1.286.103.606.504	1.195.102.581.450	93%	

2.2 Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Subkegiatan

Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum pada Renja dapat dilihat pada Grafik 2.2

Grafik 2. 2 Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian



Sumber : Data tarikan yang diolah dari system Emonev 2025 Triwulan 4

- A : Program Pengelolaan Kecamatan

B : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

C : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- D : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

E : Program Pengelolaan Kota Administrasi

Berdasarkan Grafik 2 di atas, dapat diketahui pada level Program terdapat 5 Program yang telah berjalan dengan rata-rata capaian kinerja Program berdasarkan target Triwulan 4 yaitu sebesar 100%, realisasi Program telah memenuhi target.

Kemudian, pada level Kegiatan terdapat 14 Kegiatan dengan rata-rata

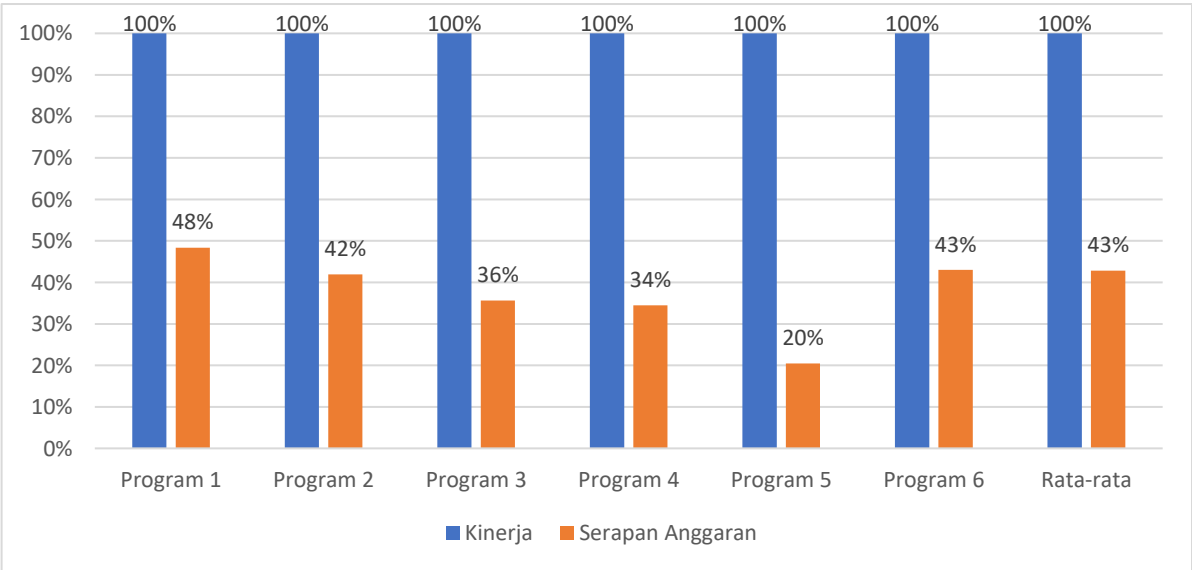
capaian kinerja Kegiatan berdasarkan target Triwulan 4 yaitu sebesar 100%, realisasi Kegiatan telah memenuhi target.

Selanjutnya, pada level Sub Kegiatan terdapat 73 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 99,98% pada Triwulan 4. Namun, terdapat capaian kinerja Sub Kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan target yaitu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, ditetapkan target sebanyak 219 unit dengan realisasi sebanyak 208 unit atau 94,98% dari target. Ketidaktercapaian target disebabkan oleh perubahan spesifikasi.
- b. Sementara itu, pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, ditetapkan target sebanyak 85 unit, dengan realisasi sebesar 78 unit atau 91,76% dari target. Ketidaktercapaian target disebabkan oleh adanya kesalahan input target yang tertera pada DPA.

Selanjutnya evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Triwulan 2 Tahun 2026. Rekapitulasi data Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026 secara ringkas dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut ini:

**Grafik 2. 3 Capaian Kinerja Program dan Presentase Serapan Anggaran
Triwulan 2 Tahun 2026**



Sumber : Data tarikan yang diolah dari sistem e-Monev 2026 Triwulan 2

Program 1:

Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan

Program 4:

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program 2:	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program 5:	Program Pengelolaan Kota Administrasi
Program 3:	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program 6:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Analisis:

Berdasarkan Grafik 1 di atas, dapat diketahui bahwa dari 6 Program Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026 secara keseluruhan capaian kinerja program sebesar 100%. Selain itu, diketahui target anggaran sebesar Rp 1.319.547.702.684,- dan realisasi sampai dengan Triwulan 2 sebesar Rp 565.264.992.037,- atau 43%.

Secara rinci Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Target Anggaran sebesar Rp 240.429.655.890,- dan realisasi sebesar Rp 116.288.161.835,- atau 48%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%, Target Anggaran sebesar Rp 374.314.051.168,- dan realisasi sebesar Rp 156.871.636.471,- atau 42%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Target Anggaran sebesar Rp 129.753.092.070,- dan realisasi sebesar Rp 46.221.824.644,- atau 36%.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Target Anggaran sebesar Rp 4.316.978.665,- dan realisasi sebesar Rp 1.488.215.313,- atau 34%.
5. Program Pengelolaan Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Target Anggaran sebesar Rp 5.594.498.544,- dan realisasi sebesar Rp 1.143.641.550,- atau 20%.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Target Anggaran sebesar Rp 565.139.426.347,-dan realisasi sebesar Rp 243.251.512.224,- atau 43%.

Upaya strategis dalam yang dilakukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka mencapai target program adalah

1. Melakukan Rapat Koordinasi Wilayah dalam rangka penyelesaian permasalahan lintas sektor yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran.
3. Mengusulkan pergeseran anggaran dan percepatan penerbitan SPD dalam rangka percepatan realisasi anggaran.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

1. Kurang responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan warga, baik yang masuk melalui saluran resmi (seperti aplikasi Citizen Relations Management / CRM) maupun posko pengaduan langsung;
2. Adanya pembatasan penerbitan SPD dan efisiensi anggaran yang berdampak kurangnya dukungan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan Masyarakat.

Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan 2 Tahun 2026 yang dirinci per indikator programnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

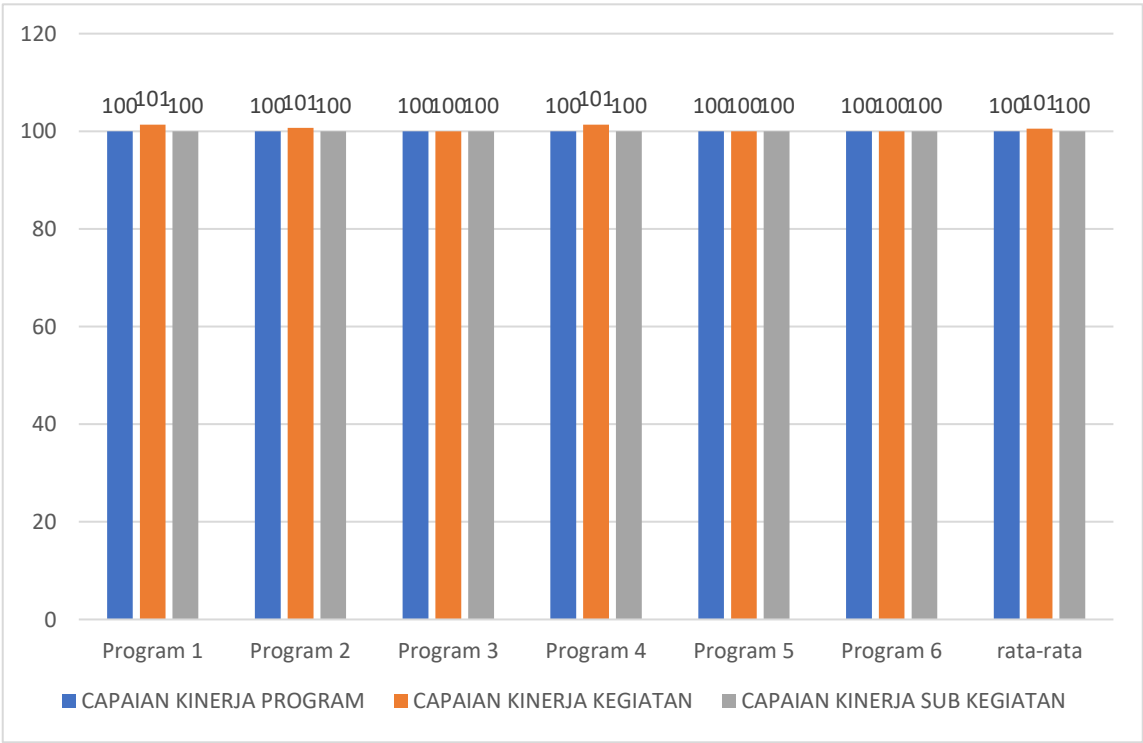
Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan 2 Tahun 2026

Kode	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Kinerja Program					Kinerja Keuangan			
				Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja s.d TW 2	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Tahunan	Total Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	100%	240.429.655.890	116.288.161.835	48,37%	
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	100%	374.314.051.168	156.871.636.471	41,91%	
7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	100%	129.753.092.070	46.221.824.644	35,62%	
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	100%	4.316.978.665	1.488.215.313	34,47%	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	100%	5.594.498.544	1.143.641.550	20,44%	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	100%				
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	4	4	4	100%	Sangat Tinggi	100%				

Kode	Program	Indikator Program		Kinerja Program					Kinerja Keuangan			
			Target Tahun 2026	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja s.d TW 2	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Tahunan	Total Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik	92	N/A	N/A	-	Sangat Tinggi	100%	565.139.426.347	243.251.512.224	43,04%	
		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100%		100%				
JUMLAH						100%	Sangat Tinggi		1.319.547.702.684	565.264.992.037	42,84%	

Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum pada Renja dapat dilihat pada Grafik 2.4

**Grafik 2. 4 Capaian Kinerja Program dan Presentase Serapan Anggaran
Triwulan 2 Tahun 2026**



Sumber : Data tarikan yang diolah dari sistem e-Monev 2026 Triwulan 2

Program 1:	Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan	Program 4:	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program 2:	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program 5:	Program Pengelolaan Kota Administrasi
Program 3:	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program 6:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Analisis :

Berdasarkan Grafik 2 di atas, dapat diketahui pada level Program terdapat 6 Program yang telah berjalan dengan rata-rata capaian kinerja Program berdasarkan target Triwulan 2 yaitu sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Program telah memenuhi target.

Kemudian, pada level Kegiatan terdapat 14 Kegiatan dengan rata-rata

capaian kinerja Kegiatan pada Triwulan 2 yaitu sebesar 101%. Terdapat beberapa kegiatan yang melebihi target 100% pada Triwulan 2 yaitu pada Kelurahan Cilandak Timur dengan indikator kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah, dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum karena terjadi kesalahan pada triwulan 1 tidak ada target namun diisi realisasi input 100%, sehingga pada triwulan 2 capaian kinerjanya mencapai 200%. Pada level Sub Kegiatan, realisasi capaian kinerja sub kegiatan telah mencapai 100%.

Secara detail hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026 dapat dilihat pada ***Lampiran I Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 (Formulir E.55 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).***

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada Sub Bab ini menjelaskan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengemban tugas dan fungsi di bidang urusan kewilayahan yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di wilayah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi bidang urusan kewilayahan, Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanyadalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisienapabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam bidang urusan kewilayahan dan bidangurusan pelimpahan kewenangan di atas, maka kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b. Terselenggaranya Pelayanan Kantor
- c. Terlaksananya Pelayanan kendaraan operasional
- d. Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- e. Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- f. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan >80 %
- g. Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan
- h. Terlaksananya Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
- i. Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Hukum
- j. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
- k. Tercapainya Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)
- l. Terlaksananya Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai
- m. Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat
- n. Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS
- o. Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak
- p. Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Tamu Kota administrasi Jakarta Selatan
- q. Terselenggaranya Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- r. Terlaksananya koordinasi penataan kawasan
- s. Terlaksananya rehab Kantor Lurah / Rumah Dinas Lurah

t. Terlaksananya rehab Kantor Camat / Rumah Dinas Camat

Indikator kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut tidak masuk dalam kriteria yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target dan capaian kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan, apabila mengacu pada kriteria yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, maka tidak ada tolok ukur dan indikator kinerja yang dapat diuji sehingga nilai capaian kinerjanya adalah kosong (nihil), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2025	2026	2027	2028	2024	2025	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1													
2													
3													
4													
5													

NIHIL

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Perlu digaris bawahi bahwa perumusan isu-isu strategis dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki Kota administrasi Jakarta Selatan. Dengan kata lain isu yang terumuskan adalah isu-isu yang dapat diberikan solusi oleh Kota administrasi Jakarta Selatan sesuai kewenangannya. Dalam hal ini perumusan isu strategis sangat menghindari munculnya isu-isu yang tidak dapat diberikan solusi oleh Kota administrasi Jakarta Selatan.

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan, telaahan visi, misi, dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD dapat disintesis beberapa aspek dan permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026, secara garis besar mengakomodir:

1. Penambahan anggaran untuk penyesuaian UMP 2026 bagi PJLP, PPSU, PPPK Paruh Waktu, Pengelola RPTRA, dan BPJS.
2. Penambahan anggaran kenaikan Honorarium Kader Jumantik sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1101 Tahun 2025 tentang Satuan Biaya dan Jenis Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue dan Chikungunya.
3. Penambahan anggaran kenaikan PMT Balita dan PMT Lansia sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2026 tentang Satuan Biaya Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan pada Pos Pelayanan Terpadu dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
4. Penyesuaian kebutuhan operasional berupa Pembayaran tagihan Telpon, Air, Listrik (TAL), BBM KDO, Pemeliharaan KDO, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas, serta Pemeliharaan Sarana Prasarana Lainnya.
5. Efisiensi anggaran pada Penyediaan Makanan Minuman Rapat, Penyediaan Spanduk Musrenbang, Pelaksanaan Kegiatan PKK, Penyediaan ATK, dll.
6. Penyesuaian berdasarkan kondisi existing dan realisasi Semester I, termasuk pengurangan pegawai yang mengundurkan diri/pensiun/belum mendapat persetujuan serta pengalihan anggaran ke kebutuhan yang lebih prioritas

Ditinjau dari berbagai dimensi telaahan yang telah dilakukan, dapat disintesis aspek dan permasalahannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lebih lanjut disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2. 4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Ruang Lingkup	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Kota Administrasi	Penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting secara optimal yang belum optimal.	Monitoring dan Evaluasi realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan per triwulan Pembentukan Tim Percetakan Penurunan Stunting Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor e-0054 Tahun 2022 Inovasi Gerakan Orangtua Asuh Anak Stunting Jakarta Selatan (GO TUNTAS JS) dengan pemberian bantuan kepada anak stunting Kerja sama sosial dengan CSR/Swadaya Masyarakat (Baznas Bazis, YBM PLN, Lions Club) untuk pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita terduga stunting
		Kondisi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang belum dalam kondisi baik.	Inventarisasi kondisi existing Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah Rekomendasi teknis sesuai kondisi di lapangan terkait pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah Pengusulan anggaran Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah
2	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.	Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang Mengoptimalkan kinerja FKDM Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota; Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban.

No	Ruang Lingkup	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanankesehatan (posyandu, DBD), perlindungan hukum dan peningkatan kinerja PPSU	Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK; Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; perlindungan hukum Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Anggaran Penetapan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 adalah sebesar Rp 1.323.684.900.442,-

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 terdapat 6 Program, 14 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan yang diampu oleh Bagian Setko Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. Total Pagu Indikatif Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 adalah sebesar Rp 1.319.094.546.807,

Penjelasan secara rinci Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada *Lampiran II Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026*.

PENUTUP

**Penutup Dokumen Perubahan Renja Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026**



Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026.

Fungsi penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 berdasarkan analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat mengawal dan memprioritaskan melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pagu program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 agar dapat dilakukan evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan skala prioritas;
3. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pembahasan KUPA PPAS, RKA/RAPBD-P dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I

FORMULIR E.55 TABEL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2026

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV							
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (5) + (11)		(13) = (12) / (4) x 100%	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	89,5	4.284.404.267.821	96.15	1.195.102.581.450													96.15	1.195.102.581.450	100%	27,89%
2		Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi						4	1.319.547.702.684		274.431.382.752	4	565.364.024.537					4	1.319.547.702.684				
3	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88.8	4.284.404.267.821	97.455	1.195.102.581.450													97.455	1.195.102.581.450	100%	27,89%
			Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	88.8		94.845														94.845			
4		Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan						4	1.319.547.702.684		274.431.382.752	4	565.364.024.537					4	1.319.547.702.684				
		Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi						4				4						4					
5	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	2.221.599.197.846	4	563.229.691.064													4	563.229.691.064	100%	25,35%
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4		4														4			
6		PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)						4	240.429.655.890		57.101.591.150	4	116.288.161.835					4	240.429.655.890				
7		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU						4	374.314.051.168		74.850.254.483	4	156.871.636.471					4	374.314.051.168				
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	32.980.038.745	4	1.072.814.314													4	1.072.814.314	100%	3,25%
9		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						4	1.103.162.767		947.233.030	4	1.001.519.176					4	1.103.162.767				
10	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	32.980.038.745	75	1.072.814.314	78	1.103.162.767	1	947.233.030	76	1.001.519.176					78	1.103.162.767	75	1.072.814.314	1875%	3,25%
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	1.189.208.296.443	4	355.618.888.582													4	355.618.888.582	100%	29,90%
12		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	Persentase Penyelesaian Masalah dalam Lingkup Pekerjaan PPSU yang Terselesaikan						100	373.210.888.401	100	73.903.021.453	102	155.870.117.295					100	373.210.888.401				
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	48	1.189.208.296.443	780	355.618.888.582													780	355.618.888.582	1625%	29,90%

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV						
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)		(12) = (5) + (11)		(13) = (12) / (4) x 100%	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	K	Rp	K	Rp	K	Rp
14		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan						780	373.210.888.401	195	73.903.021.453	390	155.870.117.295				780	373.210.888.401				
15	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	991.162.728.269	4	204.271.329.902										4	204.271.329.902	100%	20,61%		
16		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelesaian Layanan oleh RT, RW, LMK dan FKDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100	240.429.655.890	100	57.101.591.150	101	116.288.161.835				100	240.429.655.890				
17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penangan Kebersihan Lingkungan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penangan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penangan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	10336	14.383.132.680	4358	1.061.118.520	5714	1.890.692.968	1068	94.680.000	2074	270.592.600				5714	1.890.692.968	4358	1.061.118.520	42%	7,38%
18	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	48	40.271.879.900	780	9.202.838.000										780	9.202.838.000	1625%	22,85%		
19	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	48	6.441.287.156	120	1.953.657.000										120	1.953.657.000	250%	30,33%		
20		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan						900	11.562.975.000	225	965.840.000	450	3.805.110.000				900	11.562.975.000				
21	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	3098	888.178.251.877	7185	192.095.029.475	7115	223.547.429.352	6582	55.215.328.200	6582	110.853.504.739				7115	223.547.429.352	7185	192.095.029.475	232%	21,63%
22	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	16	26.513.622.974	247	1.541.951.440										247	1.541.951.440	1544%	5,82%		
23	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	16	863.415.333	38	313.001.266										38	313.001.266	238%	36,25%		
24		Pelaksanaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual						287	2.463.271.354	55	714.356.000	136	1.238.126.000				287	2.463.271.354				
25	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	4	10.029.772.645	60	370.392.467										60	370.392.467	1500%	3,69%		
26		Penanganan Bencana	jumlah pelaksanaan penanganan bencana						61	965.287.216		111.386.950		120.828.496				61	965.287.216				
27	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	4	1.650.303.912															0%	0,00%	
28	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	1	3.991.286.951	1											1			100%	0,00%	
29	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	6.144.477.330															0%	0,00%	
30	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	8.248.134.389	4	2.266.658.266										4	2.266.658.266	100%	27,48%		
31	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	4	804.818.167															0%	0,00%	
32	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	1	138.613.733															0%	0,00%	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	284.715.587.294	4	120.783.245.049										4	120.783.245.049	100%	42,42%		
34		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA						4	129.753.092.070		19.280.815.141	4	46.221.824.644				4	129.753.092.070				

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 [%]	
											I		II		III		IV							
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (5) + (11)		(13) = (12) / (4) x 100%	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
35	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	203.288.061.392	4	92.613.783.997	4	97.755.305.255		16.352.673.841	4	37.750.591.420					4	97.755.305.255	4	92.613.783.997	100%	45,56%
36	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	11080	203.288.061.392	8335	92.613.783.997											8335	92.613.783.997	75%	45,56%		
37		Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan						8326	97.755.305.255	8177	16.352.673.841	8177	37.750.591.420					8326	97.755.305.255				
38	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	4	81.427.525.902	4	28.169.461.052											4	28.169.461.052	100%	34,59%		
39		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						4	31.997.786.815		2.928.141.300	4	8.471.233.224					4	31.997.786.815				
40	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	152	78.736.723.006	75	27.931.649.019	149	31.713.068.839	148	2.920.991.300	148	8.454.333.224					149	31.713.068.839	75	27.931.649.019	49%	35,47%
41	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7060	2.690.802.896	584	237.812.033	57	284.717.976	7	7.150.000	7	16.900.000					57	284.717.976	584	237.812.033	8%	8,84%
42	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	8.392.686.441	4	3.488.959.851											4	3.488.959.851	100%	41,57%		
43		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum						4	4.316.978.665		596.915.100	4	1.488.215.313					4	4.316.978.665				
44	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	100	8.392.686.441	100	3.488.959.851	100	4.316.978.665	100	596.915.100	101	1.488.215.313					100	4.316.978.665	100	3.488.959.851	100%	41,57%
45	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	16	8.392.686.441	300	3.488.959.851	300	4.316.978.665	75	596.915.100	150	1.488.215.313					300	4.316.978.665	300	3.488.959.851	1875%	41,57%
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Indeks Persen	4 60	1.757.051.002.660	4 85	503.874.836.776											4 85	503.874.836.776	100%	28,68%		
47		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik						4 92	565.139.426.347	4	122.314.981.878	4	243.251.512.224					4 92	565.139.426.347				
48		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	75.099.800	4	1.950.000	4	24.510.800					4	75.099.800				
49		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2	27.268.100			1	7.800.000					2	27.268.100				
50		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	47.831.700	1	1.950.000	2	16.710.800					4	47.831.700				
51	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	4	1.375.302.260.644	4	369.630.402.283	4	417.709.593.070	4	110.457.545.107	4	210.938.090.976					4	417.709.593.070	4	369.630.402.283	100%	26,88%
52	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2776	1.375.274.760.644	849	369.440.643.783	808	417.478.881.270	808	110.385.313.507	808	210.760.093.576					808	417.478.881.270	849	369.440.643.783	31%	26,86%
53	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	27.500.000	299	189.758.500	304	230.711.800	76	72.231.600	152	177.997.400					304	230.711.800	299	189.758.500	623%	690,03%
54	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	4	1.781.150.000																		
55	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	137.000.000																		

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 (%)		
											I		II		III		IV									
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (5) + (11)				(13) = (12) / (4) x 100%	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp		
56	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	4	1.712.493.208	4	667.655.501	4	643.831.012	4		4	30.489.480					4	643.831.012	4	667.655.501	100%	38,99%		
57	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	176	90.242.724	6	45.818.580	3	23.050.944									3	23.050.944	6	45.818.580	3%	50,77%		
58	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	132	1.622.250.484	11	621.836.921	11	620.780.068			3	30.489.480					11	620.780.068	11	621.836.921	8%	38,33%		
59	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	4	66.684.184.562	4	25.268.778.720	4	30.150.546.575	4	2.033.613.372	4	9.266.495.937					4	30.150.546.575	4	25.268.778.720	100%	37,89%		
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	203	3.841.636.092	64	1.718.650.620	66	1.950.725.195			7	750.877.525					66	1.950.725.195	64	1.718.650.620	32%	44,74%		
61	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	648	21.066.870.507	96	4.080.005.367	92	4.778.589.800	2		11	1.977.693.189					92	4.778.589.800	96	4.080.005.367	15%	19,37%		
62	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	380	6.903.644.006	80	1.651.070.979	81	1.682.481.938			5	189.808.031					81	1.682.481.938	80	1.651.070.979	21%	23,92%		
63	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	385	11.651.109.746	120	3.796.963.576	120	4.771.141.775	1	477.245.882	19	1.506.730.441					120	4.771.141.775	120	3.796.963.576	31%	32,59%		
64	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	447	4.661.000.463	73	1.026.275.104	73	1.173.410.172			4	117.891.349					73	1.173.410.172	73	1.026.275.104	16%	22,02%		
65	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8	1.330.000.000	76	7.303.825.824	77	8.725.703.703	76	906.013.490	76	2.575.401.402					77	8.725.703.703	76	7.303.825.824	950%	549,16%		
66	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	652	15.173.284.004	300	3.904.084.750	300	5.148.794.000	75	508.924.000	150	1.690.429.000					300	5.148.794.000	300	3.904.084.750	46%	25,73%		
67	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	16	526.320.000	282	1.787.902.500	272	1.659.699.992	68	141.430.000	136	449.865.000					272	1.659.699.992	282	1.787.902.500	1763%	339,70%		
68	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1.300.000.000			1	260.000.000				7.800.000					1	260.000.000						
69	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	230.319.744																				
70	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	101.668.924.317	4	27.357.406.737	4	15.310.651.394	4		4	804.391.470					4	15.310.651.394	4	27.357.406.737	100%	26,91%		
71	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	456	3.248.502.000	49	4.417.924.038	84	3.718.677.646			2	172.638.300					84	3.718.677.646	49	4.417.924.038	11%	136,00%		
72	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	192	9.769.663.256	604	10.632.082.831	747	10.003.831.086			4	569.448.870					747	10.003.831.086	604	10.632.082.831	315%	108,83%		
73	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	83.209.094.830																				
74	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3.069.215.425	3	120.080.910	5	184.791.769									5	184.791.769	3	120.080.910	60%	3,91%		
75	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	76	2.372.448.806	134	12.187.318.958	118	1.403.350.893			1	62.304.300					118	1.403.350.893	134	12.187.318.958	176%	513,70%		
76	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	129.301.894.365	4	46.503.763.579	4	52.208.400.312	4	9.405.916.603	4	19.663.459.516					4	52.208.400.312	4	46.503.763.579	100%	35,97%		
77	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	32.423.357																				
78	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	33.200.000.000	912	20.513.026.210	912	24.276.668.015	228	4.245.839.781	456	8.539.800.104					912	24.276.668.015	912	20.513.026.210	1900%	61,79%		
79	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	16	15.131.882.397	304	4.601.990.208	304	4.905.942.926	76	498.633.962	152	1.722.674.492					304	4.905.942.926	304	4.601.990.208	1900%	30,41%		
80	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	80.937.588.611	132	21.388.747.161	132	23.025.789.371	33	4.661.442.860	66	9.400.984.920					132	23.025.789.371	132	21.388.747.161	275%	26,43%		

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 (%)				
											I		II							III	IV	
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)		(12) = (5) + (11)		(13) = (12) / (4) x 100%	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
81	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	82.244.245.564	4	34.446.829.956	4	49.041.304.184	4	415.956.796	4	2.524.074.045			4	49.041.304.184	4	34.446.829.956	100%	41,88%
82	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2486	18.327.566.479	634	7.180.200.980	631	8.679.045.993	275	414.368.266	356	1.916.325.444			631	8.679.045.993	634	7.180.200.980	26%	39,18%
83	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	304	1.121.495.000	15	1.704.960										15	1.704.960	5%	0,15%	
84	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6704	14.748.635.306	1219	1.788.635.410	1134	2.680.457.449	11		88	299.614.250			1134	2.680.457.449	1219	1.788.635.410	18%	12,13%
85	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	52	16.402.310.664	81	18.049.956.916	92	28.045.904.495			3	27.991.425			92	28.045.904.495	81	18.049.956.916	156%	110,05%
86	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	686	27.015.523.381	139	5.999.871.213	189	7.900.366.731		1.588.530	8	23.982.980			189	7.900.366.731	139	5.999.871.213	20%	22,21%
87	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2920	4.628.714.734	1134	1.426.460.477	1188	1.735.529.516	17		67	256.159.946			1188	1.735.529.516	1134	1.426.460.477	39%	30,82%
88	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	88,5	12.645.793.580	98,525	3.725.848.710										98,525	3.725.848.710	100%	29,46%	
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	88,5		92,885											92,885				
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	88,5		93,13											93,13				
89		PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan						4	5.594.498.544		286.825.000	4	1.242.674.050			4	5.594.498.544				
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan						4				4				4					
			Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat						4				4				4					
90	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen Persen	100 100	12.645.793.580	100 100	3.725.848.710	100	5.594.498.544		286.825.000	100	1.242.674.050			100	5.594.498.544	100 100	3.725.848.710	100%	29,46%
91	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	7060	522.720.000			1671	118.715.000			1671				1671	118.715.000				
92	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	16	696.580.000	4	128.312.500	4	165.657.500	1		2	54.752.500			4	165.657.500	4	128.312.500	25%	18,42%
93	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	16	126.720.000	4	50.500.000	4	91.300.000	1		2	28.480.000			4	91.300.000	4	50.500.000	25%	39,85%
94	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	16	164.400.000	7	114.995.000	7	126.320.000	1		3	15.800.000			7	126.320.000	7	114.995.000	44%	69,95%
95	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen	4	41.800.000			1	17.850.000							1	17.850.000				
96	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	16	35.000.000	4	20.050.000										4	20.050.000	25%	57,29%	
97	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	4	10.372.320	1	3.705.000										1	3.705.000	25%	35,72%	
98	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	16	101.746.800	4	19.646.665										4	19.646.665	25%	19,31%	
99	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	16	7.200.000	4	3.240.000	4	3.600.000	1		2	1.800.000			4	3.600.000	4	3.240.000	25%	45,00%

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV							
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (5) + (11)		(13) = (12) / (4) x 100%	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
100	Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi						4	293.150.000	1		2	60.755.000					4	293.150.000				
101	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	16	1.688.000.000	4	483.887.346	4	897.733.664	1		2	176.548.450					4	897.733.664	4	483.887.346	25%	28,67%
102	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen	16	1.060.000.000	4	499.435.000	4	770.256.000	1		2	108.550.000					4	770.256.000	4	499.435.000	25%	47,12%
103	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen	8	32.400.000	2	7.540.000	2	7.800.000			1						2	7.800.000	2	7.540.000	25%	23,27%
104	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	8	1.040.000.000	2	14.300.000	2	14.300.000			1						2	14.300.000	2	14.300.000	25%	1,38%
105	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	8	7.200.000	2	13.000.000	2	13.000.000			1						2	13.000.000	2	13.000.000	25%	180,56%
106		Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi						4	133.450.000	1		2	28.470.000					4	133.450.000				
107	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	4	52.000.000	2	23.228.133												2	23.228.133	50%	44,67%	
108		Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi						2	37.312.100			1						2	37.312.100				
109	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	4	228.118.000	1	120.000.000	1	120.738.000									1	120.738.000	1	120.000.000	25%	52,60%
110	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	4	66.300.000	2	66.390.000	2	69.207.400			1						2	69.207.400	2	66.390.000	50%	100,14%
111	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	16	429.000.000	4	134.160.000	4	144.300.000	1	24.050.000	2	48.100.000					4	144.300.000	4	134.160.000	25%	31,27%
112	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	4	39.000.000	1	95.508.000												1	95.508.000	25%	244,89%	
113		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi						2	21.450.000				7.800.000					2	21.450.000				
114		Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi						4	137.475.000	1	6.500.000	2	11.050.000					4	137.475.000				
115	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen	16	11.520.000	4	5.184.000												4	5.184.000	25%	45,00%	
116		Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi						4	289.440.000	1	43.275.000	2	80.550.000					4	289.440.000				
117	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen	8	36.440.000	2	4.805.000	2	2.188.600									2	2.188.600	2	4.805.000	25%	13,19%
118	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan	Dokumen	16	44.200.000	4	5.880.000	4	8.301.600	1		2	3.600.000					4	8.301.600	4	5.880.000	25%	13,30%

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 (%)		
													I		II		III		IV								
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (5) + (11)		(13) = (12) / (4) x 100%				
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi																K <td>Rp<td>K<td>Rp<td>K<td>Rp</td></td></td></td></td>	Rp <td>K<td>Rp<td>K<td>Rp</td></td></td></td>	K <td>Rp<td>K<td>Rp</td></td></td>	Rp <td>K<td>Rp</td></td>	K <td>Rp</td>	Rp			
119	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	17.600.000	2	3.150.000	2	13.241.000			1						2	13.241.000	2	3.150.000	50%	17,90%			
120	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen	4	22.100.000	2	5.154.000	2	5.770.800			1	2.880.000					2	5.770.800	2	5.154.000	50%	23,32%			
121	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen	16	34.640.000	4	8.300.000	4	20.200.000	1		2	3.780.000					4	20.200.000	4	8.300.000	25%	23,96%			
122	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan	4	1.603.014.000																					
123	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	8	816.150.000	2	409.661.601											2	409.661.601			25%	50,19%			
124		Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi						4	452.391.880	1		2	116.477.100					4	452.391.880							
125	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen	4	145.806.320	2	62.439.970											2	62.439.970			50%	42,82%			
126	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	16	55.200.000	4	10.969.995											4	10.969.995			25%	19,87%			
127	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	16	26.000.000	4	6.500.000											4	6.500.000			25%	25,00%			
128	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	48	3.390.246.140	12	943.421.500	12	898.855.000	3	205.250.000	6	394.650.000					12	898.855.000	12	943.421.500	25%	27,83%			
129	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen	16	57.600.000	4	22.680.000	4	91.000.000	1		2	26.325.000					4	91.000.000	4	22.680.000	25%	39,38%			
130	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen	16	11.520.000	4	7.455.000											4	7.455.000			25%	64,71%			
131	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen	16	25.200.000	4	432.350.000											4	432.350.000			25%	1715,67%			
132		Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi						4	593.745.000	1	7.750.000	2	67.756.000					4	593.745.000							
133		Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi						2	29.250.000			1						2	29.250.000							
134		Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi						2	6.500.000			1	4.550.000					2	6.500.000							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :												100%	20,80%									100%	42,85%				
Predikat Kinerja :												Sangat Tinggi Sangat Tinggi										Sangat Tinggi Sangat Tinggi					

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra 2023-2026	Sasaran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2025 (%)	
							I	II	III	IV				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (5) + (11)	(13) = (12) / (4) x 100%	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Faktor Pendorong : Kota Administrasi : Faktor Pendorong dalam mendukung pencapaian kinerja TW II adalah adanya komitmen dari pimpinan Tingkat Kota untuk terus memfasilitasi dan mendorong penyelesaian masalah lintas sektor di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Penyelarasan program-program Suku Dinas dengan kebutuhan riil di lapangan, Optimalisasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor, Penggunaan sistem aplikasi pemantauan wilayah yang terintegrasi (seperti dasbor evaluasi kinerja atau sistem CRM pengaduan Masyarakat, Hubungan kerja yang solid di luar rapat formal memangkas waktu birokrasi yang panjang saat menghadapi situasi darurat di wilayah. Kecamatan Administrasi : Faktor Pendorong dalam mendukung pencapaian kinerja TW II adalah Kecapatan untuk merespons cepat setiap aduan warga, baik yang masuk melalui saluran resmi (seperti aplikasi Citizen Relations Management / CRM) maupun posko pengaduan langsung, Optimalisasi Kinerja dan Peran Petugas PPSU, Petugas RPTRA, Kader dan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dukungan anggaran dalam penyediaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan pelayanan Masyarakat.														
Faktor Penghambat : Kota Administrasi : Faktor Penghambat dalam mendukung pencapaian kinerja TW II adalah Kepala Suku Dinas lebih memprioritaskan target kinerja dari Kepala Dinas di tingkat Provinsi ketimbang arahan dari Walikota/Asisten Sekko, Suku Dinas sering kali langsung mengeksekusi program ke lapangan tanpa berkoordinasi secara matang dengan Camat atau Lurah selaku koordinator wilayah. Kecamatan Administrasi : Faktor Penghambat dalam mendukung pencapaian kinerja TW II adalah Kurang responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan warga, baik yang masuk melalui saluran resmi (seperti aplikasi Citizen Relations Management / CRM) maupun posko pengaduan langsung, Adanya pembatasan penerbitan SPD dan efisiensi anggaran yang berdampak kurangnya dukungan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan Masyarakat.														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) oleh Bappeda : a. Manajer Kinerja Organisasi (MKO) di Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat mengoptimalkan peran dalam upaya koordinasi, monitoring, dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Setko, Kecamatan dan Kelurahan. Mohon untuk melakukan pola yang sama pada TW 3 khususnya untuk faktor pendorong yang telah dilakukan pada TW 1 dan 2, Lakukan penjadwalan ulang untuk kegiatan yang tertunda dilaksanakan pada TW 2 untuk diselesaikan pada TW 3 dengan tetap memperhatikan kemungkinan perubahan pada RKPD/APBD Tahun 2026. b. Ketidaktercapaian kinerja akibat kesalahan teknis (kesalahan input, lupa input, dan sebagainya) agar dapat diantisipasi untuk tidak terjadi. c. Agar dipastikan realisasi kinerja yang diinput merupakan realisasi/capaian kinerja sebenarnya/sesuai dengan kondisi pelaksanaan. d. Perlu dilakukan pengecekan dan evaluasi kembali atas realisasi anggaran belanja wajib mengikat yang nilai realisasinya masih sangat rendah. e. Perlu melakukan pengecekan kembali atas capaian realisasi anggaran, dikaitkan dengan realisasi kinerja pada triwulan yang bersangkutan. f. Selanjutnya, PD agar melaksanakan seluruh proses pelaksanaan kegiatan dengan mengedepankan akuntabilitas dan menghindari pengelolaan belanja yang dapat dikategorikan sebagai penyusutan, pemerasan, gratifikasi.														

Disusun

Jakarta, 14 Agustus 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan


Syafri Liputo
NIP. 197103261994031005

LAMPIRAN II.
TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENJA-PD KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

NO	KODE UNIT	PD/UKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ID SK	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SEMULA	ANGGARAN SK SEMULA	USULAN PERUBAHAN (MENJADI)	
											TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	719387	7.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.268.100	2 Dokumen	14.268.100
2	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	719593	7.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	47.831.700	4 Laporan	34.831.700
3	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	717676	7.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	808 Orang/ Bulan	417.478.881.270	842 Orang/ Bulan	386.013.722.219
4	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	715338	7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	16.481.800	4 Dokumen	16.481.800
5	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	716514	7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	506.317.392	1 Paket	506.317.392
6	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716518	7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	552.604.080	1 Paket	552.604.080
7	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716431	7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.129.210.529	2 Paket	1.129.210.529
8	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716505	7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	273.481.600	2 Paket	273.481.600
9	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716496	7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	374.137.344	3 Paket	363.827.520
10	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716502	7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.367.504	1 Paket	101.367.504
11	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716508	7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	366.851.520	1 Paket	327.546.000
12	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716410	7.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	89.700.000
13	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	716520	7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.181.300.064	1 Paket	1.181.300.064
14	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	701364	7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	185 Unit	2.970.998.912	181 Unit	2.589.587.392
15	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	716529	7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	31 Unit	4.750.113.547	31 Unit	4.750.113.547
16	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717133	7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.525.088.880	12 Laporan	9.704.587.680

NO	KODE UNIT	PD/UKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ID SK	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SEMULA	ANGGARAN SK SEMULA	USULAN PERUBAHAN (MENJADI)	
											TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716538	7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	540.615.264	4 Laporan	540.615.264
18	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716558	7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.885.654.863	12 Laporan	16.690.266.948
19	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716562	7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	421.295.056	20 Unit	445.814.656
20	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716570	7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	844.430.338	69 Unit	437.704.126
21	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716571	7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	19.861.809.120	5 Unit	19.861.542.840
22	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716576	7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	112 Unit	7.085.487.268	112 Unit	7.295.825.060
23	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719567	7.02.02.6.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1671 Lembaga	118.715.000	1671 Lembaga	118.715.000
24	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	711322	7.02.02.6.03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	4 Dokumen	165.657.500	4 Dokumen	150.087.500
25	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	711405	7.02.02.6.03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	4 Dokumen	91.300.000	4 Dokumen	80.946.000
26	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	712168	7.02.02.6.03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	7 Dokumen	126.320.000	7 Dokumen	73.950.000
27	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	711067	7.02.02.6.03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	1 Dokumen	17.850.000	1 Dokumen	17.850.000
28	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	715723	7.02.02.6.03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	4 Dokumen	3.600.000	4 Dokumen	3.600.000
29	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	716385	7.02.02.6.03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	4 Dokumen	897.733.655	4 Dokumen	897.687.408
30	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	716394	7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	4 Dokumen	770.255.999	4 Dokumen	770.248.000
31	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	716370	7.02.02.6.03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	2 Dokumen	7.800.000	2 Dokumen	7.800.000
32	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	716610	7.02.02.6.03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	2 Dokumen	14.300.000	2 Dokumen	14.300.000
33	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	716367	7.02.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000
34	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	713325	7.02.02.6.03.0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi	1 Dokumen	120.738.000	1 Dokumen	120.738.000

NO	KODE UNIT	PD/UKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ID SK	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SEMULA	ANGGARAN SK SEMULA	USULAN PERUBAHAN (MENJADI)	
											TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)				
35	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	716738	7.02.02.6.03.0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	2 Dokumen	69.207.400	2 Dokumen	69.207.400
36	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	717681	7.02.02.6.03.0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	4 Dokumen	144.300.000	4 Dokumen	144.300.000
37	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719612	7.02.02.6.03.0019	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	1 Dokumen	29.250.000	1 Dokumen	29.250.000
38	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	715539	7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	2 Dokumen	2.188.600	2 Dokumen	2.188.600
39	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	713590	7.02.02.6.03.0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	4 Dokumen	8.301.600	4 Dokumen	8.301.600
40	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	713211	7.02.02.6.03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	2 Dokumen	13.241.000	2 Dokumen	2.700.000
41	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	714164	7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	5.770.800	2 Dokumen	5.770.800
42	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	713412	7.02.02.6.03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	4 Dokumen	20.200.000	4 Dokumen	20.200.000
43	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	717773	7.02.02.6.03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	12 Dokumen	898.855.000	12 Dokumen	898.855.000
44	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719620	7.02.02.6.03.0043	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	2 Dokumen	6.500.000	2 Dokumen	6.500.000
45	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	715702	7.02.02.6.03.0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	4 Dokumen	91.000.000	4 Dokumen	65.000.000
46	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719470	7.02.02.6.03.0047	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	4 Dokumen	593.745.000	4 Dokumen	483.195.000
47	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719430	7.02.02.6.03.0048	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	4 Dokumen	289.440.000	4 Dokumen	211.440.000
48	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719515	7.02.02.6.03.0049	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	4 Dokumen	293.150.000	4 Dokumen	293.150.000
49	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719690	7.02.02.6.03.0050	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	4 Dokumen	133.450.000	4 Dokumen	133.450.000
50	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719510	7.02.02.6.03.0051	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	4 Dokumen	137.475.000	4 Dokumen	130.975.000

NO	KODE UNIT	PD/UKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ID SK	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SEMULA	ANGGARAN SK SEMULA	USULAN PERUBAHAN (MENJADI)	
											TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	721411	7.02.02.6.03.0052	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	2 Dokumen	37.312.100	2 Dokumen	17.031.200
52	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	719619	7.02.02.6.03.0053	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	2 Dokumen	21.450.000	2 Dokumen	21.450.000
53	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	721427	7.02.02.6.03.0054	Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	4 Laporan	452.391.880	4 Laporan	345.820.640
TOTAL										491.795.724.685		458.078.423.169



TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENJA- PD KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

Disusun
Jakarta, 14 Agustus 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan


Syafin Liputo
NIP. 197103261994031005